

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dinamika komunikasi politik di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan perubahan yang signifikan, terutama dengan semakin kompleksnya hubungan antara pemimpin politik, kebijakan publik, dan opini warga (Pratama, 2024). Menurut website Kamedia.id menyatakan bahwa, pada tingkat lokal, kepala daerah tidak hanya dinilai dari kinerja pembangunan, tetapi juga dari kemampuan mereka merespons persoalan sosial yang sensitif, seperti konflik organisasi kemasyarakatan (ormas) dan praktik kekerasan berbasis kelompok, serta tarik-menarik kepentingan ekonomi di ruang publik, misalnya dalam sengketa lahan parkir dan pengelolaan usaha (Wawan, 2025). Media sosial menjadi ruang utama di mana informasi tentang kebijakan pemerintah disebar dan diperdebatkan oleh publik (Rizqi et al., 2023). Sejalan dengan pandangan (Coombs, 2002), dalam konteks manajemen isu dan krisis, cara sebuah institusi publik merespons isu yang terekspos luas di ruang publik digital akan sangat menentukan bagaimana publik membentuk penilaian mengenai tanggung jawab, kepedulian, dan kompetensi institusi tersebut. Dengan kata lain, cara pemerintah menangani sebuah persoalan dan cara persoalan itu diberitakan di media sosial akan sangat memengaruhi bagaimana warga menerima dan menilai langkah-langkah tersebut (Rahmanto, 2022). Dalam konteks itu, dalam Nawacita.co pernyataan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang menegaskan bahwa “semua yang tinggal di Surabaya adalah warga Surabaya” ketika menanggapi polemik Mie Gacoan dengan Ormas MADAS

menjadi penting, karena konflik tercipta sebagai persoalan keadilan dan perlindungan bagi semua warga (Agustino, 2025)

Analisis *Reception* digunakan karena penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa makna tidak berhenti pada pesan yang disampaikan pemerintah, tetapi dikonstruksi secara aktif oleh masyarakat sebagai penerima pesan (Rahmanto, 2022). Masyarakat menafsirkan dan menilai strategi pemerintah dalam menyelesaikan persoalan publik berdasarkan pengalaman, latar sosial, dan sumber informasi yang mereka akses, terutama dari media sosial (Mahreva Basuki & Shidi). Dalam perspektif Coombs (2010), manajemen krisis tidak hanya berkaitan dengan tindakan substantif yang diambil organisasi, tetapi juga dengan bagaimana pesan dan penjelasan atas tindakan tersebut diterima oleh publik dengan sasaran yang dituju. Hal ini, diartikan sebagaimana keberhasilan penanganan isu dan krisis juga diukur dari sejauh mana publik menilai respon itu tepat, adil, dan dapat dipercaya (Rahmanto, 2022). Dalam konteks penanganan persoalan ormas MADAS dalam berita Liputan Jatim Bersatu, analisis resepsi memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana warga Surabaya menerima, menyetujui, meragukan, atau bahkan menolak strategi yang ditempuh oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota ketika mereka berhadapan dengan kasus-kasus yang berpotensi memicu keresahan dan konflik horizontal mulai dari kasus kekerasan yang melibatkan oknum ormas, polemik ekonomi seperti Mie Gacoan dengan Ormas, hingga tuduhan intimidasi terhadap aksi-aksi kritis mahasiswa dan pemuda di ruang publik kota (Arifin, 2025).

Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur yang menempati posisi kota terbesar kedua di Indonesia dengan jutaan penduduk yang memiliki ruang sosial yang sangat dinamis (Setyawan, 2022). Surabaya menjadi pusat ekonomi, pemerintahan, sekaligus aktivitas berbagai organisasi masyarakat, baik yang berbasis keagamaan, etnis, kepemudaan, maupun sosial kemasyarakatan. Di tengah keragaman ini, konflik atau gesekan yang melibatkan ormas MADAS memiliki potensi besar menimbulkan rasa tidak aman dan memunculkan stigma buruk terhadap iklim sosial kota (Mahreva Basuki et al.). Jika menggunakan kacamata manajemen isu Coombs (2010) dalam buku Rachmat Kriyantono, konfigurasi seperti ini menunjukkan adanya isu laten yang sewaktu-waktu dapat berekskalasi menjadi krisis ketika tidak diidentifikasi dan dikelola secara sistematis oleh otoritas lokal. Dalam situasi seperti ini yang diberitakan di jatimnow.com, peran Wali kota Eri Cahyadi dan Armuji sebagai Wakil Wali Kota menjadi strategis, bukan hanya untuk mengendalikan situasi keamanan, tetapi juga untuk meyakinkan warga bahwa pemerintah hadir dan berpihak pada keselamatan serta hak-hak warga (Masduki, 2026). Di tengah menguatnya sensitivitas publik terhadap praktik premanisme, tekanan terhadap ormas MADAS yang dianggap meresahkan, serta pengalaman langsung warga dan kelompok mahasiswa yang merasa diintimidasi ketika menyuarakan kritik, seperti dalam Aksi Demo Solidaritas Pemuda Mahasiswa Merah Putih di Balai Kota Surabaya pada periode Agustus-September 2025.



Gambar 1.1 Berita tentang Insiden pengusiran paksa nenek Elina di Surabaya Dalam berita BBC New Indonesia

Peristiwa pengusiran dan perusakan rumah Nenek Elina di Surabaya menjadi salah satu titik krusial yang menggambarkan kerumitan persoalan ormas MADAS di tingkat lokal. Salah satu peristiwa yang menarik perhatian public Adalah kasus pengusiran seorang lansia Bernama Nenek Elina yang kemudian dikaitkan dengan keterlibatan oknum ormas MADAS (BBC NEWS, 2025). Peristiwa ini tidak hanya menyangkut aspek hukum kepemilikan, tetapi juga memunculkan isu ketidakadilan dan dugaan premanisme terhadap warga rentan. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu reaksi luas dari masyarakat. Narasi tentang kekerasan, intimidasi, dan penyalahgunaan posisi sosial menyebar dengan cepat, sehingga menimbulkan tekanan kuat kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang diduga berperan dalam peristiwa itu. Dalam logika Coombs (2010), situasi ini menunjukkan pergeseran dari tahap isu menuju krisis, dimana persepsi publik mengenai tanggung jawab dan sensitivitas pemerintah menjadi faktor penentu dalam pemulihan kepercayaan.

Viralnya kasus Nenek Elina di media sosial diikuti dengan aksi masa dan desakan pembubaran ormas MADAS yang dianggap meresahkan. Ratusan warga mendatangi kantor ormas MADAS yang dikaitkan dengan kasus tersebut untuk menyuarakan penolakan terhadap praktik kekerasan dan segala bentuk premanisme yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (CNN INDONESIA, 2025). Situasi ini memperlihatkan bahwa persoalan ormas MADAS tidak lagi hanya menjadi ranah hukum atau administrasi, tetapi telah menjadi isu publik yang menyentuh rasa keadilan dan rasa aman warga. Pada titik ini, setiap pernyataan dan langkah yang diambil oleh Eri Cahyadi dan Armuji akan dipantau, dinilai, dan ditafsirkan oleh warga, terutama melalui kaca mata pemberitaan dan perbincangan di media sosial (BBC NEWS, 2025). Coombs (2010) menekankan bahwa pada fase krisis semacam ini, organisasi dituntut untuk memberikan respons yang cepat, konsisten, dan akuntabel, karena memperdalam krisis kepercayaan publik.

Dimensi tekanan publik terhadap ormas MADAS juga tampak dalam Aksi Demo Solidaritas pemuda Mahasiswa Merah Putih di depan Balai Kota Surabaya pada September 2025, yang menyoroti dugaan kejanggalan APBD dan tuntutan kepemimpinan yang bersih (Resty, 2025). Aksi yang semula berlangsung damai itu justru diwarnai dugaan intimidasi dari sejumlah oknum ormas atau kelompok yang diduga preman, yang masuk ke tengah masa, menghadang, dan berupaya membubarkan peserta aksi. Koordinator aksi mengecam insiden tersebut sebagai bentuk pembungkaman demokrasi dan "premanisme politik" yang mengancam kebebasan berpendapat, sehingga memunculkan pertanyaan dikalangan warga

mengenai sejauh mana pemerintah kota mampu dan mau melindungi hak konstitusional warga untuk menyampaikan kritik secara damai (Resty, 2025)

Pemerintah Surabaya melalui Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji mengambil sejumlah Langkah strategis seperti pernyataan public, pembentukan Satgas Anti Premanisme, serta mediasi dan. Eri Cahyadi menyatakan bahwa tindakan kekerasan dan pengusiran paksa terhadap warga tidak dapat dibenarkan, menegaskan pentingnya penyelesaian melalui jalur hukum, dan menyampaikan komitmen untuk mengawal proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat (Elaine, 2025). Seiring menguatnya tekanan publik, Eri mengumumkan pembentukan Satgas Anti-Premanisme dan menyatakan bahwa ormas yang terbukti melakukan praktik premanisme dapat direkomendasikan untuk dibubarkan sesuai prosedur hukum (Amaluddin, 2025). Di sisi lain, Pemkot juga menginisiasi pertemuan dengan berbagai ormas dan elemen masyarakat dalam forum deklarasi “*Surabaya Bersatu*” untuk menegaskan bahwa ormas diharapkan menjadi mitra pemerintah dalam menjaga ketertiban, bukan sumber ketakutan bagi warga. Jika dibaca melalui kerangka Coombs (2010), rangkaian kebijakan dan upaya memperbaiki kondisi yang dirugikan sekaligus membangun kembali kepercayaan publik melalui janji perubahan dan penegasan sikap moral. Langkah-langkah ini pada dasarnya merupakan strategi pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan ormas, sekaligus mengirimkan pesan simbolik bahwa Surabaya harus bebas dari premanisme.

Armuji sebagai Wakil Wali Kota mengambil peran yang lebih langsung di tingkat komunikasi lapangan. Ia turun ke lokasi, bertemu keluarga korban, dan

menyampaikan kecaman terhadap tindakan yang dikaitkan dengan oknum ormas MADAS (Widiyana, 2026). Namun, pernyataan publik Armuji yang sempat menyebut nama dan atribut salah satu ormas secara spesifik menimbulkan polemik baru, karena ormas yang dimaksud membantah keterlibatan dan merasa dirugikan oleh penyebutan tersebut. Polemik ini berkembang menjadi ketegangan terbuka, termasuk adanya langkah pelaporan Armuji ke kepolisian oleh pihak ormas, sehingga isu awal mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan beririsan dengan persoalan akurasi tuduhan dan reputasi organisasi. Dalam perspektif manajemen krisis Coombs (2010), situasi ini menggambarkan pentingnya sensitivitas komunikasi pada fase krisis, karena kesalahan dalam pembungkaiian atau penyebutan pihak tertentu yang dapat memunculkan krisis turunan (*secondary crisis*) yang menyentuh aspek reputasi aktor politik dan pihak-pihak lain yang disebut.



Gambar 1.2 Berita tentang Armuji Wakil Wali Kota Surabaya dan Ormas MADAS Sepakat Damai
Sumber: suarasurabaya.net

Armuji melaksanakan mediasi terbuka sebagai upaya untuk meredakan ketegangan sekaligus menjaga konduktivitas Kota Surabaya. Dalam mediasi ini,

Armuji memberikan klarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka terkait kekeliruan penyebutan nama ormas MADAS dan simbol organisasi dalam pernyataannya (Fajar Saifullah, 2024). Ia menjelaskan bahwa pernyataan tersebut keluar dalam situasi respons cepat terhadap laporan yang diterimanya di lapangan, namun tetap mengakui bahwa kesalahan tersebut telah menimbulkan keresahan dan potensi konflik horizontal. Menurut pemberitaan suarasurabaya.net pihak ormas MADAS pada akhirnya menerima klarifikasi dan permohonan maaf tersebut, dan kedua belah pihak sepakat untuk mencabut laporan serta menutup polemik demi menjaga keharmonisan sosial di Surabaya (Wildan, 2026). Dalam kerangka Coombs (2010), langkah klarifikasi, pengakuan kesalahan, dan permohonan maaf terbuka dapat dipahami sebagai bagian dari strategi *rebuilding* yang bertujuan untuk memulihkan kepercayaan dengan cara menunjukkan tanggung jawab dan komitmen untuk memperbaiki situasi. Momen klarifikasi dan perdamaian ini menjadi titik krusial pembentukan citra, karena di satu sisi menampilkan Armuji sebagai pemimpin yang bersedia bertanggung jawab dan berdamai demi kepentingan publik.

Dinamika penyelesaian konflik tersebut memperlihatkan adanya perbedaan pendekatan komunikasi antara Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dan Wakil Wali Kota, Armuji, dalam merespons berbagai persoalan yang melibatkan ormas. Perbedaan tersebut tercermin pada gaya penyampaian pesan, penekanan narasi, serta strategi komunikasi yang digunakan dalam menjelaskan sikap dan kebijakan kepada publik. Situasi ini tidak serta merta menunjukkan pertentangan terbuka,

melainkan menghadirkan variasi representasi kepemimpinan yang dapat dimaknai berbeda oleh masyarakat.

Kondisi di atas membentuk sebuah konteks yang menarik untuk dikaji dalam perspektif penerimaan warga. Di era media sosial dalam pemberitaan Metro TV, warga tidak hanya menyaksikan tindakan pemerintah, tetapi juga mengonsumsi dan memperbincangkan berbagai potongan informasi, narasi, dan opini yang beredar mengenai langkah-langkah Eri Cahyadi dan Armuji dalam mengatasi persoalan ormas, kasus nenek Elina, sengketa parkir digital Mie Gacoan dengan Ormas MADAS dan PJS, maupun situasi intimidasi terhadap demonstrasi mahasiswa (Amaluddin, 2025). Respon pemerintah tidak selalu dimaknai secara seragam oleh masyarakat. Sebagian warga memaknainya sebagai bentuk kepemimpinan yang tegas, sementara sebagian lainnya menilai langkah tersebut secara lebih kritis. Variasi penerimaan ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah dalam mengatasi persoalan ormas tidak secara otomatis diterima secara seragam oleh publik, melainkan dinegosiasikan maknanya dalam konteks pengalaman, preferensi politik, serta paparan media yang mereka miliki (Suhendra & Feny Selly Pratiwi, 2024). Menurut literatur Coombs (2010) tentang manajemen isu dan krisis, cara publik menilai respons pemerintah terhadap krisis sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan upaya pemulihan kepercayaan, sehingga penerimaan warga menjadi dimensi penting yang tidak dapat diabaikan dalam evaluasi strategi penanganan persoalan ormas.



Gambar 1.3 Penerimaan Warga Online terhadap pernyataan Pengumpulan massa Ormas di Surabaya
Sumber: Tiktok Surabaya_kabarmetro

Kondisi ini sekaligus menciptakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji melalui analisis resepsi, di mana publik tidak hanya menilai kinerja substantif para pemimpin, tetapi juga bagaimana mereka merespons situasi krisis yang melibatkan masyarakat rentan dan berpotensi memicu konflik horizontal. Fenomena ini menunjukkan bahwa citra dan legitimasi politik tidak semata-mata dibangun melalui kampanye atau program pembangunan, tetapi juga melalui respons terhadap krisis sosial, seperti tindakan terhadap kasus kekerasan, premanisme, dan pelanggaran hak warga. Publik tidak hanya menilai kebijakan formal, tetapi juga simbol, gestur, dan pernyataan yang muncul dalam ruang publik, misalnya konferensi pers, unggahan media sosial, maupun tindakan simbolik di lokasi kejadian. Dalam kerangka analisis resepsi, respons masyarakat terhadap tindakan Eri Cahyadi dan Armuji dapat dipahami sebagai hasil interpretasi yang beragam. Dalam hal ini, warga menerima secara dominan sebagai bentuk kepemimpinan tegas dan pro-rakyat, ada yang melakukan negosiasi makna, dan ada pula yang bersikap oposisi. Variasi ini dipengaruhi oleh latar belakang sosial,

pengalaman pribadi, preferensi politik, serta paparan media yang membentuk *frame of knowledge* dan cara pandang publik (Fajar, 2024).

Selama ini, kajian komunikasi politik lokal lebih banyak berfokus pada citra kepala daerah dalam konteks kampanye politik atau personal branding. Sementara itu, kajian mengenai penerimaan Masyarakat terhadap respons pemimpin daerah dalam menangani konflik sosial yang viral di media sosial masih terbatas. Seperti konflik parkir digital Mie Gacoan dengan Ormas MADAS dan Paguyuban Juru Parkir Surabaya (PJS). Strategi tersebut diposisikan dalam kerangka manajemen isu dan krisis, belum banyak mendapat perhatian. Padahal, cara warga menilai langkah-langkah pemerintah dalam situasi yang menyentuh rasa aman dan keadilan memiliki implikasi langsung terhadap legitimasi politik, kepercayaan publik, dan ruang gerak pemerintah dalam merumuskan kebijakan ke depan. Coombs (2010) menjelaskan bahwa keberhasilan manajemen krisis tidak hanya diukur dari tindakan substantif organisasi, tetapi juga dari sejauh mana tindakan itu mampu membentuk persepsi dan penerimaan publik yang positif setelah krisis. Kekosongan kajian inilah yang menjadi celah penting bagi penelitian tentang bagaimana warga Surabaya menerima citra politik Eri Cahyadi dan Armuji dalam manajemen isu ormas yang diberitakan melalui media sosial pada Agustus-September 2025, sekaligus bagaimana penerimaan tersebut berkaitan dengan efektivitas manajemen isu dan krisis yang dijalankan pemerintah kota.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian dalam kajian komunikasi politik lokal di Jawa Timur, yang secara khusus mengintegrasikan analisis resepsi terhadap strategi kepala daerah dalam menangani konflik ormas dan premanisme

yang terekspos di media sosial, bukan hanya dalam konteks kampanye atau pencitraan elektoral. Selama ini, banyak penelitian mengenai resepsi publik terhadap tokoh politik yang berfokus pada iklan politik, debat kandidat, atau program pembangunan, sementara pemaknaan warga terhadap tindakan wali kota dan wakil wali kota dalam kasus kekerasan yang menyentuh kelompok rentan seperti, pengusiran nenek Elina, sengketa ekonomi lokal seperti, polemik Mie Gacoan dengan Ormas MADAS dan Paguyuban Juru Parkir Surabaya (PJS), serta intimidasi terhadap aksi kritis mahasiswa dan pemuda belum banyak dieksplorasi secara sistematis sebagai satu rangkaian isu. Padahal, cara warga menilai langkah pemerintah kota, dan dukungan Masyarakat terhadap kebijakan penanganan ormas serta premanisme (CNN INDONESIA, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis “**Penerimaan Warga Surabaya Terhadap Citra Politik Eri Cahyadi dan Armuji Dalam Pemberitaan Manajemen Isu Ormas di Media sosial Periode Agustus-September 2025.**”. Sebagaimana terekspos melalui pemberitaan dan perbincangan di media sosial pada akhir tahun 2025. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi pola resepsi yang dikembangkan oleh Stuart Hall (1980) melalui model, *dominant-hegemonic position*, *negotiated position*, dan *oppositional position* dalam konstruksi makna publik terhadap langkah-langkah pemerintah kota, serta menelaah faktor-faktor yang memengaruhinya, seperti latar belakang sosial, pengalaman dengan layanan pemerintah, preferensi politik, dan paparan media digital. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan empiris terhadap kajian manajemen isu krisis dengan politik lokal, sekaligus menawarkan

pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana kebijakan penanganan konflik ormas bekerja tidak hanya di level kebijakan formal, tetapi juga di level persepsi dan kepercayaan warga.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang sudah penulis uraikan, maka perlu untuk dilakukan pengkajian mendalam tentang Bagaimana Penerimaan Warga Surabaya Terhadap Citra Politik Eri Cahyadi dan Armuji Dalam Pemberitaan Manajemen Isu Ormas di Media sosial Periode Agustus-September 2025?.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana warga Surabaya sebagai pengguna media sosial menerima dan memaknai Citra Politik Eri Cahyadi dan Armuji dalam pemberitaan Manajemen isu Ormas di Media Sosial Periode Agustus-September 2025, dengan menggunakan perspektif analisis resepsi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian analisis teori resepsi Stuart Hall dengan menggesernya dari konteks kampanye dan peristiwa simbolik ke ranah konflik ormas dan premanisme, sehingga membuka pemahaman baru tentang bagaimana posisi *dominant-hegemonic position*, *negotiated position*, dan *oppositional position* bekerja ketika publik memaknai respons pemimpin terhadap kekerasan berbasis kelompok.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Kota Surabaya, temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi strategis untuk menata ulang kebijakan, pola komunikasi publik, dan cara mereka merepresentasikan kepemimpinan ketika berhadapan dengan isu sensitif seperti konflik ormas dan premanisme, sehingga respons yang muncul tidak hanya tegas secara hukum, tetapi juga selaras dengan harapan keadilan masyarakat dan tidak mudah disalahpahami.